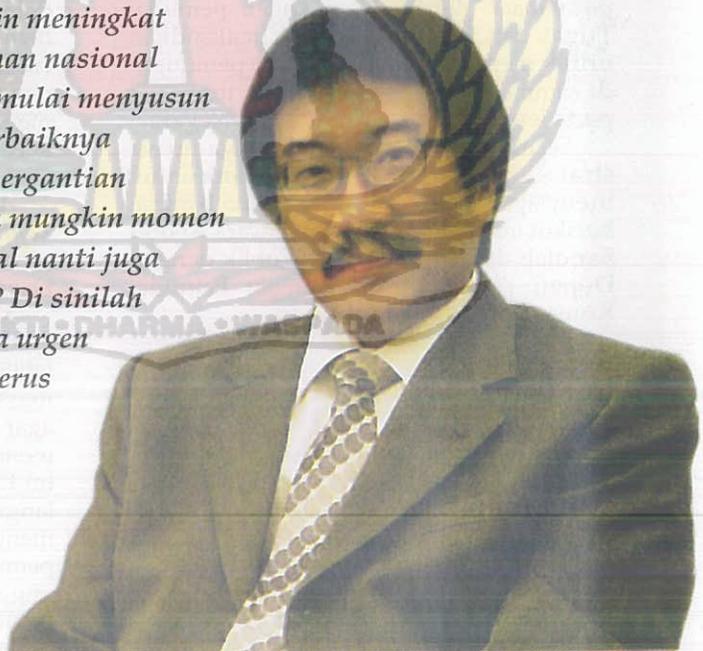


Wawancara Khusus

MEMBANGUN KADER PEMUDA SEBAGAI PEMIMPIN BANGSA BUKAN HANYA TUGAS PARPOL

Tahun 2012 banyak yang memprediksi akan menjadi tahun krusial bagi produktif tidaknya sebuah proses alih generasi politik. Pada tahun 2012 suhu politik memang semakin meningkat menjelang pergantian kepemimpinan nasional tahun 2014. Partai politik sudah mulai menyusun strategi dan menyiapkan kader terbaiknya guna memanfaatkan momentum pergantian kepemimpinan nasional. Seberapa mungkin momen pergantian kepemimpinan nasional nanti juga mencerminkan adanya regenerasi? Di sinilah masalah regenerasi menjadi terasa urgen untuk didiskusikan karena akan terus mendapat perhatian masyarakat.



M.B. Zubakhrun

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI

Mungkin harapan akan regenerasi kepemimpinan nasional tidak harus diartikan sebagai sebuah langkah kritis bernuansa politis, mengoreksi kepemimpinan yang telah dan sedang berkuasa. Karena regenerasi selain merupakan sebuah proses alamiah, atau sesuatu keniscayaan dan sesuatu yang imperatif. Tetapi regenerasi juga bisa berarti memunculkan harapan-harapan baru yang memungkinkan untuk mendorong akan terjadinya perubahan yang lebih menjanjikan bagi kemajuan bangsa dan Negara.

Namun, apakah ada generasi muda sekarang ini memiliki kapasitas dan memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin bangsa? Persoalan kaderisasi kepemimpinan tidak hanya menjadi tanggung jawab partai politik, meskipun saat ini sistem dan regulasi memberi kewenangan yang besar bagi partai politik untuk mengusung calon pemimpin bangsa. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) justru memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengembangan pemuda. Tugas dan fungsi ini tentu dimaksudkan untuk menyiapkan kader-kader pemimpin di semua bidang dan semua lini, termasuk pada level pemimpin bangsa dan Negara.

Sejauh mana program dan upaya-upaya strategis yang dilakukan Kemenpora untuk menyiapkan kader kepemimpinan bangsa, berikut ini petikan hasil wawancara Abduh Sandiah dari Jurnal Dialog Publik dengan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kemenpora, M.B. Zubakhrun.

Bagaimana persepsi terhadap Pemerintah dalam kaitan dengan semangat reformasi ?

Pemimpin bangsa Indonesia sekarang ini bisa dinilai sudah sesuai dengan semangat reformasi, terutama diperlihatkan dengan transparansi dan demokrasi. Setiap kebijakan pemerintah dikontrol langsung oleh masyarakat, jika dianggap kurang pas maka akan menuai kritik. Begitu juga dengan kebebasan pers, sehingga menjadi sarana kontrol yang cukup efektif terhadap setiap kebijakan pemerintah. Reformasi juga memposisikan eksekutif dan legislatif punya posisi yang seimbang untuk saling

kontrol.

Terkait dengan persoalan korupsi, kita harus jernih melihatnya. Terungkapnya banyak kasus korupsi, termasuk yang melibatkan oknum partai yang memerintah, merupakan akibat dari transparansi dan keterbukaan yang dilakukan pemerintah. Kalau pemerintah bersikap tertutup, maka korupsi tidak pernah terungkap. Jadi dengan berbagai kasus korupsi sekarang ini bukan berarti menunjukkan pemerintah saat ini lemah, tetapi justru menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, termasuk dalam tubuh pemerintah sendiri.

Keberhasilan pemerintah sekarang ditunjukkan di bidang pembangunan ekonomi dengan indikator meningkatnya pendapatan domestik bruto Indonesia menjadi 17 besar di dunia, sehingga Indonesia masuk menjadi anggota "G 20". Kemudian pendapatan perkapita Indonesia saat ini meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2008 pendapatan perkapita Indonesia baru pada posisi 1.168 dolar AS. Tetapi pada tahun 2011, sudah mencapai 3.600 dolar AS. Presiden SBY bahkan menargetkan pada tahun 2016 pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai 5.000 dolar AS. Itu menunjukkan keberhasilan dari pemimpin sekarang.

Apa kebijakan pemerintah secara konkret terkait dengan pengembangan pemuda yang punya kapasitas sebagai pemimpin?

Kondisi pemuda saat ini jauh lebih agresif dan memiliki semangat juang yang lebih kuat, dibanding dengan pemuda pada masa lalu. Namun masih perlu pembinaan, agar menjadi lebih matang dan baik ketika menjadi pemimpin harapan bangsa. Sejauh ini Kemenpora sudah punya program dan langkah-langkah kebijakan dalam rangka mengarahkan pemuda agar menjadi pemimpin masa depan. Salah satu program unggulan adalah "Ketahanan Nasional Pemuda". Dalam pelaksanaannya ternyata program ini cukup menarik dan diminati para pemuda. Program ini dilakukan untuk mengembangkan potensi pemuda untuk menjadi pemimpin. Pesertanya terdiri dari organisasi kemahasiswaan

dan organisasi-organisasi pemuda yang dianggap potensial memproduksi calon-calon pemimpin. Bahkan jauh sebelumnya kegiatan yang sama dengan nama yang berbeda yakni "Dialog Pemuda" dilakukan sampai pada tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Dari hasil inventarisasi melalui kegiatan tersebut, mereka yang punya potensi dan kapisatas sebagai pemimpin, dilanjutkan dengan pelatihan kepemimpinan di tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Materi-materi yang diberikan antara lain membangkitkan semangat nasionalisme melalui penghayatan dan pengamalan Pancasila serta UUD 1945. Selama ini penghayatan dan nilai-nilai falsafah dan dasar negara tersebut sudah mulai luntur, yang berdampak pada menurunnya semangat nasionalisme. Selain itu kalau berbicara tentang pemimpin tidak hanya dilihat dari aspek politik semata, tetapi mencakup semua aspek dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sehingga dalam kurikulum program ketahanan Nasional Pemuda meliputi juga masalah ekonomi keterampilan, globalisasi dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan mereka yang telah melewati proses pembinaan ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai bidang dan sektor, tidak hanya sebagai pemimpin politik.

Pemuda pada tahun 2012 ini diprediksi menjadi pemimpin tahun 2020/2025. Untuk mempersiapkan pemimpin pada periode tersebut maka dilakukan program yang sifatnya membangun kader pemimpin mulai dari bawah. Masalah yang dihadapi yang menjadi tantangan adalah jumlah penduduk yang sangat banyak dan tingginya angka urbanisasi pemuda. Data menunjukkan urbanisasi pemuda dari tahun 1995/2005 memperlihatkan perbandingan pemuda di kota mencapai 3% dan di desa hanya 1%. Ini berarti pemuda cenderung ke kota.

Pembinaan yang dilakukan pada level pemuda, seperti melalui program-program yang sudah dikemukakan di atas. Program-program dimaksud untuk membuka cakrawala berpikir yang lebih luas bagi para pemuda. Selama ini mereka tidak tau apa yang harus dilakukan, artinya mereka harus diberi pemahaman

bahwa tidak semua yang dilakukan pemerintah itu salah. Pemuda seharusnya tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan sesaat kelompok kepentingan.

Di daerah ada Dinas Pemuda dan Olah Raga yang punya tugas dan fungsi sama dengan Kemenpora, yakni merekrut organisasi-organisasi pemuda dan Mahasiswa dan menyiapkan mereka untuk jadi pemimpin. Ini dibuktikan dengan upaya melibatkan pemuda dalam setiap proses perumusan kebijakan. Program tersebut tidak hanya di pusat tapi pelaksanaannya sampai ke daerah. Begitu juga dengan peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). KNPI sekarang ini diposisikan sebagai mitra pemerintah, tetapi organisasi tempat berhimpun para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan ini tetap bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah.

Langkah apa yang dilakukan untuk mencegah urbanisasi pemuda ?

Upaya yang dilakukan adalah bagaimana agar para pemuda nyaman tinggal di desa. Maka program yang dilakukan pemerintah adalah membangun desa menjadi sumber kehidupan dan memberi kesejahteraan. Untuk itu Kemenpora punya program Pemuda Sarjana Program Penggerak Pedesaan (PSP3). Para pemuda desa difasilitasi agar mereka merasa nyaman hidup di desa, ada bantuan untuk mengembangkan usaha baik di bidang pertanian maupun non pertanian. Program ini juga dimaksudkan untuk mengurangi model pemuda yang hanya pintar melakukan kritik tanpa tindakan konkret. Jadi harus ada proses pembenahan dimulai dari bawah memenuhi kebutuhan pemuda sampai mereka berkembang dan memiliki kapasitas masing-masing, termasuk sebagai pemimpin. Pemuda harus memiliki unsur-unsur terkait seperti kewirausahaan, kepeloporan dan lain-lain. Kalau semuanya sudah terpenuhi maka pemuda akan memiliki kepedulian untuk mengembangkan diri dan meningkatkan potensi kepribadiannya.

Sebenarnya batasan pemuda itu pada usia berapa sampai berapa tahun?

Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan sudah memberi batasan umur kategori pemuda. Para pemuda yang aktif dalam organisasi harus berumur antara 16 sampai 30 tahun. Ketentuan itu dimaksudkan agar supaya terjadi proses regenerasi. Sampai saat ini sosialisasi Undang-undang tersebut masih dilakukan, agar organisasi-organisasi kepemudaan patuh dan tunduk pada amanat Undang-undang. Kemudian juga dengan adanya Undang-undang tentang Keormas yang mengatur tentang organisasi-organisasi yang masuk kategori dan memenuhi syarat sebagai organisasi kepemudaan.

Harapan pada Pemilu 2014 nanti akan terjadi regenerasi kepemimpinan bangsa sehingga akan terjadi perubahan-perubahan mendasar bagi kemajuan bangsa dan negara. Seberapa siapkah generasi muda mengambil ofer tongkat estafet kepemimpinan?

Prinsipnya pemuda siap untuk mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan bangsa, namun persoalan yang dihadapi saat ini adalah seolah-olah tidak ada pengakuan terhadap pemimpin yang telah dipilih secara demokratis. Setiap pemimpin yang naik selalu ada upaya untuk menurunkan. Kondusi seperti ini harus segera dibenahi. Masyarakat harus menerima secara legowo sebuah hasil pemilihan yang dilakukan secara demokratis. Langkah perbaikan itu dilakukan melalui program Ketahanan Nasional Pemuda dan Program yang baru diluncurkan yakni Parlemen Pemuda. Melalui program ini para pemuda diberdayakan sebagai mitra DPRD, sehingga mereka benar-benar mengetahui berbagai masalah yang terkait dengan aspirasi masyarakat dan program serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan DPRD dan Pemerintah. Program ini sifatnya pelibatan Pemuda dalam memecahkan persoalan bangsa.

Jadi jangan persoalan regenerasi diposisikan bahwa pemerintah sekarang lemah atau tidak berhasil sehingga diperlukan alih generasi. Masalah alih

generasi ini sangat jarang diperbincangkan di negara manapun, kecuali di Indonesia. Seperti Cina, umumnya yang menjadi pemimpin adalah mereka yang sudah kategori tua atau senior. Di Eropa juga jarang yang muda yang menjadi pemimpin, terutama pemimpin pemerintahan. Jadi bukan alih generasi yang terpenting dalam kepemimpinan, tetapi yang dibutuhkan adalah pemimpin yang siap untuk melakukan transformasi nasional.

Potensi kepemimpinan bangsa lebih banyak berasal dari unsur mana, apakah dari birokrasi, politisi, akademisi, atau dari TNI?

Kita melihat ada kecendrungan kuat calon-calon pemimpin bangsa masih berasal dari unsur partai politik baik mereka yang nanti menjadi anggota legislatif maupun yang masuk dalam lingkup eksekutif. Persoalannya sekarang adalah kualitas partai politik dalam merekrut kader-kadernya masih dipertanyakan. Buktinya, banyak kader-kader pemimpin yang ada diberbagai lembaga kualitasnya agak menyedihkan. Tetapi bagaimana pun sistem politik kita memberi kewenangan pada partai politik untuk merekrut pemimpin bangsa, termasuk dalam proses penggodokan alih generasi, sehingga kemungkinan besar pemimpin bangsa ke depan masih didominasi oleh para politisi. Jadi untuk mempersiapkan pemimpin bangsa merupakan konsensus dari partai-partai politik. Sementara sebagai orang pemerintah sulit memprediksi siapa yang bakal menjadi pemimpin nanti. Tapi sekali lagi ingat bahwa kaderisasi pemimpin muda bukan hanya tugas Parpol, tetapi juga tugas pemerintah, dan tugas kita bersama.

Apakah pemuda sekarang ada yang memiliki kapaasitas sebagai pemimpin bangsa?

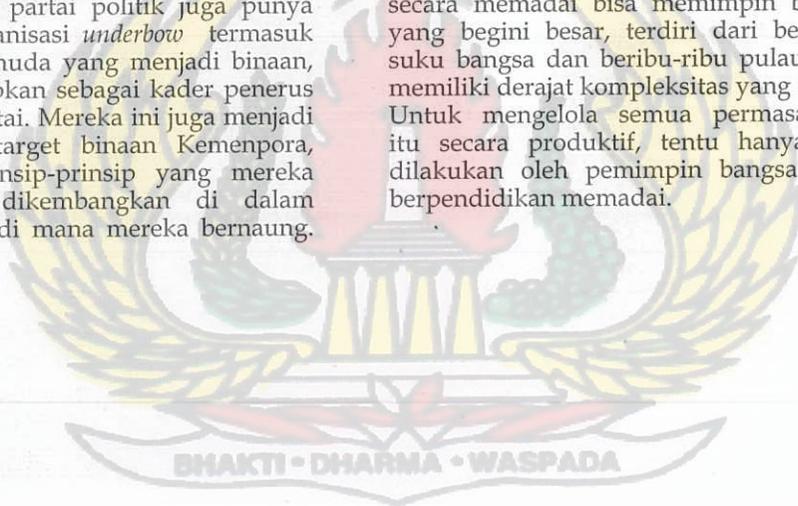
Sebenarnya kalau berbicara mengenai kapasitas, banyak pemuda di negeri ini memiliki kapasitas menjadi pemimpin bangsa. Sebut salah satunya adalah Anis Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, kapasitasnya tidak diragukan lagi tetapi persoalannya adalah apakah dia mendapat dukungan politik. Kalau tidak, berarti layu

sebelum berkembang. Buktinya calon-calon yang diusung sekarang adalah para senior partai seperti Wiranto dari partai Hanura, Prabowo Subianto dari Gerindra dan lain-lain. Sebenarnya boleh maju sebagai calon independen, tapi kenyataannya oleh KPU dipersulit. Pada prinsipnya sistem yang ada sekarang sudah bagus, dan regulasinya memang mengatur seperti itu. Kalau dikaitkan dengan tugas Kemenpora maka yang disiapkan adalah menyiapkan pemimpin-pemimpin pada batasan minimal yang diperlukan oleh seorang pemuda. Setelah itu masalah bagaimana dia memainkan peran sebagai pemimpin atau tidak, kembali kepada faktor kesiapan masing-masing orang. Persoalan lain adalah mau tidaknya partai politik mengubah ketentuan undang-undang yang membatasi usia maksimal pemimpin. Walaupun demikian harus juga diakui bahwa partai politik juga punya organisasi-organisasi *underbow* termasuk organisasi pemuda yang menjadi binaan, yang dipersiapkan sebagai kader penerus pemimpin partai. Mereka ini juga menjadi bagian dari target binaan Kemenpora, sehingga prinsip-prinsip yang mereka terima bisa dikembangkan di dalam partai politik di mana mereka bernaung.

Walaupun demikian karena ruang bermain mereka di lingkup partai politik, maka pasti dalam menyikapi mereka pun berbeda dengan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya.

Berdasar pengamatan dan praktek pembinaan pemuda sebagai pemimpin masa depan bangsa, kira-kira apa saja kriteria pemimpin yang diinginkan?

Pertama diperlukan cakap dalam memimpin, matang dan sudah punya banyak pengalaman dalam kepemimpinan, bisa menjadi contoh, bersih, punya jiwa nasionalisme, peka terhadap masalah yang ada dalam masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah mereka yang berpendidikan, karena dengan pendidikan dan pengalaman akan menunjukkan kapasitas seseorang. Sebab bagaimana mungkin orang yang tidak berpendidikan secara memadai bisa memimpin bangsa yang begini besar, terdiri dari berbagai suku bangsa dan beribu-ribu pulau serta memiliki derajat kompleksitas yang tinggi. Untuk mengelola semua permasalahan itu secara produktif, tentu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin bangsa yang berpendidikan memadai.



TOTO ANTARA

I



TINTA

ketidakcocokan hubungan antar elemen kognisi. Pengetahuan, pendapat, keyakinan atau apa yang dipercayai tentang dirinya sendiri dan lingkungannya merupakan bagian dari elemen-elemen pokok kognisi. Dalam konteks pemilu, jika masyarakat memahami pemilu sebagai mekanisme demokrasi yang dapat membawaperubahan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik sementara dalam praktiknya hanya menjadi rebutan jabatan antara elit partai politik maka akan melahirkan hubungan disonan atau penyangkalan di tingkatan Pemilihan. Ini merupakan keadaan psikologis yang tidak menyenangkan yang timbul saat dalam diri pemilih terjadi konflik antara dua kognisi, yakni antara pengetahuan mengenai pentingnya menggunakan hak pilih sebagai wujud partisipasi politik dalam pemilu dan ketidakpercayaan terhadap kualitas pelaksanaan pemilu itu sendiri. Inilah yang oleh para ahli teori desonansi kognitif seperti Festinger disebut sebagai inkonsistensi kognitif. Desonansi kognitif yang tak teratasi dengan baik, bisa menyebabkan pemilih apatis bahkan apolitis di kemudian hari. Pemilu seyogianya tidak semata-mata melahirkan fantasi-fantasi tak bermakna, melainkan harus menjadi momentum pemberdayaan sehingga terbentuk pemilih rasional (*rasional voter*) yang memiliki daya tawar bagi hak dan kewajiban sipil-politiknya.

Tensi politik dalam pemilu biasanya memanans seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang bertarung. Dalam konteks inilah, politik kerap kali didefinisikan sebagai "who gets what and when". Sebuah upaya untuk mencapai kekuasaan, yang sejatinya memang menarik minat banyak orang. Menurut Deliar Noer, politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk memengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat (Deliar Noer, 1983 : 6).

Hingga sekarang, demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia belum maksimal berpihak pada rakyat. Berbagai fenomena politik menunjukkan masih dominannya politik kaum elit. Suara rakyat masih diposisikan sebagai nominal suara dalam pemilu yang dikapitalisasi untuk memenangkan partai politik maupun kandidat saat mereka berkontestasi dalam

demokrasi elektoral yang sangat mahal. Sejak reformasi, fase demokrasi kita belum beranjak optimal dari transisi demokrasi. Seharusnya perubahan yang ideal itu adalah pascaperubahan politik seperti momentum reformasi 1998, seluruh upaya diorientasikan bagi konsolidasi demokrasi dan pelembagaan politik.

Hanya saja, di banyak fase kesejarahan proses transisi itu mengalami sumbatan akibat fragmentasi kekuatan politik yang tidak selalu memiliki agenda sama untuk mengonsolidasikan demokrasi. Kekuasaan kerap terjebak pada konflik elit terkait dengan rangkaian pemilu baik di level nasional maupun di pemilihan kepala daerah (pilkada). Hampir setiap saat energi kreatif bangsa ini tersedot ke dalam pusaran konflik dan mekanisme saling sandra antar kekuatan sehingga langkah untuk memperkuat jadi diri bangsa di tengah gerusan kepentingan asing atas Indonesia.

Fenomena seperti ini memang tidak semata terjadi di Indonesia. Transisi dari suatu rezim otoriter ke suatu rezim baru, belum tentu menuju ke suatu pemerintahan demokratis. Selain Indonesia, kita bisa melihatnya misalnya politik di Thailand, Filipina, Mesir, Tunisia dan sejumlah negara lain yang mengalami perubahan kekuasaan tetapi tidak langsung mampu melakukan konsolidasi demokrasi. Oleh karenanya, konsolidasi demokrasi menjadi kebutuhan sangat mendesak. Konsolidasi demokrasi dipahami sebagai upaya merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain, karena mereka yakin bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi mereka.

Dinamika demokrasi prosedural memang kerap menunjukkan wajahnya yang penuh paradoks. Di satu sisi merupakan keniscayaan, di sisi lain banyak praktik demokrasi yang menjadi residu kesejatian hubungan kemanusiaan. Demokrasi prosedural menjadi ranah kontestasi tak hanya di level interpretasi, tetapi juga di level aksi. Bagaimana sebuah sistem politik mengartikulasikan normativitas di tengah tarik-menarik

kepentingan individu maupun kolektif. Sejak diperkenalkan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM, demokrasi telah berevolusi terutama sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Menurut Giovanni Sartori (1987) sepanjang kehidupan berjalan, 'demokrasi' memperoleh arti berbeda-beda yang mengacu pada latar historis dan pada gagasan masing-masing yang amat berbeda pula.

Menurut Afan Gaffar (1991: 152) ada dua pemahaman menyangkut demokrasi, yakni:

- a. Pemahaman demokrasi normatif yang bersifat ideal dan biasanya dirumuskan secara konseptual dengan baik, indah dan menarik.
- b. Pemahaman demokrasi prosedural yang lebih banyak berorientasi pada praktik pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan politik dalam "penampilan politik" (*political performance*).

Kita bisa merujuk yang dimaksud sebagai penampilan politik (*political performance*) di atas pada pemikiran Bingham (1992) antara lain:

- a. Legitimasi pemerintah: didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. Kekuasaan telah dianggap sah jika dimiliki melalui Pemilu.
- b. Pengaturan pengorganisasian perundingan (*bergaining*): ada mekanisme kompetitif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan.
- c. Partisipasi dalam pemilu: sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan publik.
- d. Kerahasiaan dan independensi: penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksaan.
- e. Hak-hak dasar: masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.

Saat demokrasi normatif itu menjadi prosedural, maka terjadi sejumlah paradoks yang kerap menjadi noda hitam bagi praktik demokrasi itu sendiri. Misalnya di Indonesia kita pernah mengalami fase Demokrasi Parlemen (1945-1959),

Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Demokrasi Pancasila (1966-sekarang).

Dalam perspektif penulis, dinamika pertarungan politik yang terjadi kerap kali menghasilkan residu yang dapat melemahkan proses konsolidasi demokrasi. Diantara residu demokrasi elektoral yang dimaksud adalah:

1. Belum Optimalnya Sistem Presidensialisme

Saat ini Indonesia menganut sistem presidensialisme meski kerap bercitarasa parlementarisme. Mengutip tulisan Mahfud MD (2000:74), parlementarisme memiliki empat ciri utama. Pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa). Kedua, pemerintah diselenggarakan melalui sebuah kabinet yang dipimpin seorang PM. Ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan kabinet dapat dijatuhkan parlemen melalui mosi. Keempat, kedudukan eksekutif lebih rendah dari parlemen dan bergantung pada parlemen. Sementara dalam presidensialisme basis legitimasi presiden bersumber dari rakyat bukan dari parlemen. Kekuasaan pemerintahan tidak terbagi antara kedudukan presiden sebagai kepala negara (*head of the state*) dan sebagai kepala pemerintahan (*head of government*). Jabatan Presiden dan wakil presiden merupakan institusi tunggal sehingga menjadi satu paket dalam pemilu. Presiden memiliki hak prerogatif dalam membentuk kabinet sebagai konsekuensi presiden pemimpin tertinggi eksekutif yang independen dan mandiri dari parlemen.

Sejak Indonesia merdeka, kita telah menjalankan sistem multipartai. Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta nomor X/1949 merupakan titik awal implementasi sistem multipartai di Indonesia. Keputusan Wapres ini merupakan salah satu penyiapan penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen (perseorangan). Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama antara lain PNI (22,32 persen), Masyumi (20,92 persen), NU (18,41 persen), PKI (16,36 persen), PSII (2,89 persen), Parkindo (2,66 persen), PSI (1,99 persen), Partai Katolik (2,04 persen), dan IPKI (1,43 persen).

Terjadi ketidaksetabilan pemerintahan yang berlangsung antara tahun 1950-an sampai 1960-an.

Multipartai juga mengawali pemilu pertama di masa Orde Baru Tahun.1971, diikuti oleh 10 partai politik, termasuk Golkar yang saat itu menjadi kekuatan politik pemerintah. Soeharto lantas memaksakan penyederhaan parpol melalui kebijakan fusi. NU, Parmusi, PSII dan Perti direstrukturasi ke PPP. PNI, IPKI, Parkindo, Katolik direstrukturasi menjadi PDI sementara Golkar adalah parpol dominan yang menjadi sayap utama politik pemerintah. Meski dari sudut jumlah, menunjukkan masih multipartai sederhana dalam faktanya bisa dikatakan kita memasuki fase partai dominan untuk menghaluskan istilah partai tunggal, yakni Golkar sebagai satu-satunya kekuatan penguasa, meski jenis kelamin Golkar sebagai parti belum jelas. Jalur ABRI-Golkar-Birokrasi (ABG) menjadi penanda korporatisme politik yang menempatkan Soeharto di puncak hirarki kekuasaan selama 32 tahun.

Reformasi politik pada tahun 1998, melahirkan kembali liberalisasi politik. Kurang lebih 200 parpol tumbuh, dan hanya 48 parpol yang bisa mengikuti Pemilu 1999. PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, dan PAN menempati 5 suara terbanyak. Pada pemilu 2004, hanya setengah dari jumlah parpol peserta pemilu 1999 yang bisa ikut. Hal ini terkait dengan UU No 3/1999 tentang *electoral threshold*. Partai politik yang berhak untuk mengikuti pemilu berikutnya adalah partai politik yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2 persen jumlah kursi DPR. Pemilu 2004 diikuti 24 parpol dan kembali membengkak menjadi 34 parpol di Pemilu 2009. Hasil Pemilu 2009, hanya ada 9 parpol yang lolos *parliamentary threshold* (PT) 2,5 persen sebagaimana disyaratkan dan menjadi kekuatan utama di DPR sekarang (Heryanto, 2011: 253).

Dinamika multipartai di Indonesia hingga sekarang, masih menyisakan problem pada penguatan dan pelembagaan politik. Terutama dalam mendukung efektivitas pemerintahan sebagaimana lazimnya dipraktikkan dalam sistem presidensialisme. Problem mendasar kita saat ini adalah praktik presidensialisme banyak tereduksi oleh sistem multipartai ekstrem. Misalnya dalam membentuk pemerintahan setiap presiden baru

harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan parpol sehingga *zaken* kabinet yang seharusnya bisa terwujud menjadi tidak efektif. Postur birokrasi kembali mengalami obesitas akibat politik representasi.

2. Belum Optimalnya Konsep Perwakilan

Dinamika demokrasi prosedural kita telah memberi wewenang yang elitis bagi para politisi di DPR. Para politisi di fraksi maupun di komisi kerap tak mewakili suara basis konstituen melainkan parpol atau elit kekuasaan.

Dalam ranah intelektualitas, terdapat perbedaan mendasar berkenaan dengan konsep perwakilan versi John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) (Heryanto, 2011:89). Locke dalam karyanya *Two Treatises of Government* (dalam Ashcraft, 1987) melihat betapa pentingnya pemisahan kekuasaan dan dia membaginya menjadi legislatif, eksekutif dan federatif. Legislatif merupakan lembaga perwakilan masyarakat. Namun demikian, masyarakat yang dimaksud bukan masyarakat umum melainkan kaum bangsawan. Rakyat kecil atau masyarakat biasa tak termasuk kategori struktur masyarakat yang layak dibela dan diperjuangkan. Dengan demikian perwakilan rakyat dalam perspektif Locke ini merupakan perwakilan kepentingan bangsawan untuk berhadap-hadapan dengan penguasa yakni raja atau ratu. Saat itu, konteksnya raja atau ratu berkuasa kerap sewenang-wenang mengambil tanah, peternakan, kastil dan lain-lain milik para bangsawan sehingga mereka membutuhkan pelindung untuk mengamankan status kepemilikan mereka. Dalam konteks itulah, dewan atau lembaga perwakilan mereka dibutuhkan. Rakyat kecil atau masyarakat biasa dibiarkan untuk berjuang sendirian, tanpa akses pada proses pembuatan undang-undang.

Sementara dalam perspektif Secondat de Montesquieu yang dikenal dengan nama Montesquieu dalam maha karyanya *Spirits of the Laws* (dalam Cohler etc, 1989), membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konsep yang kemudian dikenal dengan Trias Politika ini lantas menjadi rujukan penting negara-negara di dunia. Kekuasaan legislatif dalam versi Montesquieu membentuk struktur politik yang fungsinya membentuk

undang-undang. Ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang sedari awal dirancang untuk mewakili dan menampung aspirasi masyarakat. Sehingga, lembaga yang mengacu ke kekuasaan legislatif ini diberi label *House of Representative* (Amerika Serikat), *House of Common* (Inggris) atau juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tentu, ada perbedaan mendasar dalam kedua versi tersebut, versi Locke nampak lebih elitis dan tersegmentasi di kaum bangsawan sementara Montesquieu lebih melihat konsep perwakilan secara luas dan merata hingga ke rakyat jelata. Secara konseptual, sistem perwakilan DPR kita mengacu pada konsep Trias Politika-nya Montesquieu. Hal ini kita buktikan dengan sistem Pemilu langsung yang telah kita gelar. Artinya setiap politisi partai yang ada di DPR mewakili sejumlah konstituen di dapil masing-masing. Namun demikian, dalam praktik politik sejak Orde Baru hingga sekarang, DPR kita lebih mirip dengan konsep perwakilan versi Locke yakni sebagai perwakilan bangsawan.

Banyak hal yang kini diperjuangkan para anggota DPR masih merupakan kepentingan elitis dan jauh dari kehendak untuk melindungi atau menyejahterakan rakyat, meski kata rakyat kerap dijadikan komoditi dalam identitasnya. Yang menonjol justru sejumlah agenda dan kepentingan kelompok menengah dan menengah atas yang menghendaki perlindungan hukum di balik sejumlah produk perundang-undangan serta fungsi pengawasan dan penganggaran DPR.

3. Menguatnya Distorsi Politik Media.

Kita tidak menyangkal salah satu kekuatan media massa adalah membentuk realitas sosial. Gebner dalam buku Boyd-Barret, *Approach to Media : a Reader* (1995) memperkenalkan konsep resonansi. Hal ini terjadi saat media massa dan realitas sebenarnya menghasilkan koherensi yang *powerfull* dimana pesan media mengkultivasi secara signifikan. Ketika realitas media mirip dengan realitas sosial yang terjadi di lingkungannya, proses resonansi itu berlaku. Dalam konteks kekuatannya inilah, maka media menjadi alat ampuh dalam pembentukan opini publik. Dalam kajian komunikasi politik, operasi opini publik pada khalayak sama dahsyatnya seperti operasi militer. Dengan

caranya yang halus, informasi merembes perlahan dalam kesadaran khalayak. Bahkan media sangat mungkin menjadi alat ampuh manipulasi keadaan serta pengendalian.

Hal yang paling penulis risaukan terkait peran jurnalis dan media massa ke depan adalah distorsi politik media. Akan semakin banyak godaan bagi Jurnalis dan media untuk berperan dalam rivalitas politik menuju pergantian kepemimpinan nasional di tahun 2014. Berbagai manuver dan skenario politik sudah mulai digulirkan oleh para politisi. Kasus demi kasus dipublikasikan dan secara sistematis didesain untuk memancing kegaduhan publik.

Hal paling krusial dalam industri media saat ini adalah kepemilikan (*ownership*). Saat ini, siapapun pemilik modal besar bisa menguasai bisnis media. Hal ini bisa dilihat dari fenomena yang menonjol beberapa tahun belakangan yakni kian intensifnya para politisi menguasai bisnis media. Berita kerap menjadi bias dan sangat tendensius pada saat mengangkat persoalan-persoalan yang memiliki irisan dengan para pemiliknya masing-masing. Media lantas tidak lagi menjadi saluran literasi politik melainkan turut menghasilkan residu yang membahayakan bagi literasi politik.

Kekuatan utama media yang tidak bisa dinafikan di era informasi saat ini yakni kekuatan dalam mengkonstruksi realitas. Artinya, kekuatan dalam mengemas berbagai isu yang ada, sehingga menonjol ke permukaan dan akhirnya menjadi perbincangan publik (*public discourse*) yang menarik. Banyak orang ataupun institusi sosial dan politik yang berkepentingan dengan media. Mereka berupaya memiliki akses untuk masuk dan mempengaruhi media, dengan asumsi penguasaan atas media akan menjadi pintu masuk dalam pengemasan dan penguasaan opini publik. Selanjutnya, dengan menguasai opini publik diharapkan akan mudah mengarahkan kecenderungan pilihan khalayak sesuai dengan yang diharapkan kandidat (Heryanto, 2010:84-88).

Dalam tulisan R.A Dahl, *Dilemas of Pluralist Democracy: Autonom Vs Control* (1982) menyebutkan bahwa demokrasi melibatkan dua variabel yakni kontestasi

dan partisipasi. Keduanya sangat penting dalam menentukan proses demokrasi Indonesia ke depan. Kita tak cukup lagi mengklaim sebagai negara demokrasi karena sukses menggelar pemilu secara reguler. Apatisme masyarakat akan semakin membesar jika para elit masih dalam kebiasaan korupsi dan *abuse of power*. Mampukah para politisi dan parpol memtradisikan politik sehat? Politik berbasis rasionalitas bernilai yang punya perhatian pada pemberdayaan kapasitas hak-hak sipil politik masyarakat. Selain itu, ke depan kita juga perlu melakukan konsolidasi demokrasi melalui pelembagaan politik yang kuat. Hal itu mestinya tercermin dalam regulasi seperti dalam paket UU Politik dan pengelolaan negara yang meruju pada kesejahteraan rakyat. Selain juga literasi politik yang lebih baik.

C. Memahami Sumber Konflik Pemilu

Banyak peristiwa pemilu yang tidak melahirkan legitimasi. Hasil yang ditetapkan tidak memiliki wibawa sebagai hasil yang sah, sehingga muncul gelombang penentangan dari berbagai pihak, terutama dari pendukung calon yang kalah. Di banyak tempat, pemilu juga tidak memiliki sistem pengorganisaian perundingan.

Jika dilihat dari proses penyelenggaraannya, konflik pemilu biasanya muncul dari hal-hal sebagai berikut: *pertama*, tahapan pendaftaran calon yang memungkinkan adanya calon yang gugur atau tidak lolos verifikasi oleh KPU. Tidak lolosnya parti politik calon peserta pemilu, begitu pun gagalnya seseorang mencalonkan diri sebagai caleg dan kandidat capres serta cawapres, biasanya menjadi salah satu penyebab utama konflik pemilu. Hal ini bisa terjadi karena beragam alasan antaralain tidak memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang.

Kedua, sengketa Pemilu juga banyak dipicu oleh tidak maksimalnya proses pendaftaran pemilih. Banyak masyarakat yang merasa berhak menjadi pemilih, tapi kenyataannya tidak terdaftar. Sebaliknya, orang-orang yang tidak berhak antaralain belum cukup umur, sudah meninggal, sudah pindah alamat dan lain-lain justru mendapat kartu DPT (Daftar Pemilih Tetap). Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan

sangat memungkinkan menjadi determinan konflik. Masalah ini telah aktual menjadi masalah pemilu pada Pemilu 2009.

Ketiga, konflik juga sangat mungkin lahir dari eksekusi masa kampanye. Berbagai upaya melakukan untuk memasarkan politik (*marketing of politics*) untuk meraih simpati publik, dalam praktiknya sekaligus juga dibarengi dengan tindakan menyerang, mendeskriditkan, *black campaign*, pembunuhan karakter yang dapat menimbulkan rasa sakit hati. Jika menemukan momentumnya, hal ini pun dapat menjadi akselerator konflik dalam Pemilu.

Keempat, tahapan yang juga biasanya krusial adalah tahapan penetapan pemenang pemilu. Fenomena yang sering muncul adalah, pihak yang kalah biasanya mengangkat isu penggelembungan suara, banyak warga yang tidak terdaftar dan persoalan pendataan pemilih lainnya sebagai sumber utama kekalahan. Massa yang merasa tidak mendapat hak pilih biasanya memprotes dan dimanfaatkan oleh pasangan yang kalah. Kita tentu ingat, dalam konteks pemilu 2009, berbagai partai politik seperti PDIP, Partai Gerindra, Partai Hanura dan sejumlah partai kecil lainnya ramai-ramai menuduh Pemilu 2009 sebagai penyelenggaraan pemilu terburuk setelah era reformasi. Sebagian dari mereka melaporkan berbagai kasus pemilu ke Mahkamah Konstitusi pascapenetapan rekapitulasi akhir pemilu oleh KPU.

Rentetan kasus dalam penyelenggaraan pemilu yang berujung konflik bisa jadi memperlemah *political performance*. Terutama, jika konflik tak bisa dikelola secara baik oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pemilu.

D. Pemimpin Nasional yang Transformasional

Hal ideal yang tentunya diharapkan publik dari penyelenggaraan pemilu adalah muncul dan terpilihnya pemimpin yang transformasional. Sosok pemimpin tipe ini adalah pemimpin yang mampu menggerakkan harapan rakyat untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan. Dalam perspektif penulis syarat-syarat pemimpin transformasional itu adalah:

Pertama, memiliki kemampuan reflektivitas yang memadai. Poole, Seibold

dan McPhee dalam Hirokawa, R.Y. & M.S Poole (1986: 237-264), memandang perlu adanya reflektivitas (*reflexivity*) dalam setiap upaya membangun perbaikan organisasi termasuk birokrasi. Reflektivitas pada dasarnya merujuk pada kemampuan aktor untuk memonitor tindakan-tindakan dan perilaku mereka. Sebagian besar reflesivitas didasarkan pada pengalaman masa lalu yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Dengan membaca masa lalu dan memperbaikinya, maka sesungguhnya bisa menatap masa depan yang jauh lebih baik. Pemerintah seharusnya memiliki dua kesadaran dalam proses reflektivitas ini yakni, kesadaran diskursif (*discursive conciousness*) dan kesadaran praktis (*practical conciousness*).

Kesadaran diskursif, merujuk pada kemampuan untuk menjelaskan kepada khalayak atas sejumlah sikap, kebijakan dan tindakan pemerintah sehingga khalayak bisa memahaminya dengan baik. Kenyataannya, kesadaran diskursif ini hingga sekarang masih tertutupi oleh prasangka berlebihan, mekanisme pertahanan diri, dan sejumlah pembenaran yang kerap berlebih-lebihan versi pemilik otoritas kekuasaan dan aparturnya. Sementara kesadaran praktis (*practical conciousness*), terkait dengan kemampuan pemimpin untuk dirasakan kehadiran dan manfaat kepemimpinannya di tengah masyarakat. Kita bisa mencontohkan aksi nyata Presiden Chili Sebastian Pinera, yang turun tangan dalam aksi penyelamatan 33 penambang yang terperangkap di bawah tanah selama 69 hari. Sebuah aksi nyata seorang pemimpin, yang layak mendapat perhatian dunia internasional. Tindakan cepat, tanpa basa-basi dan formalitas lembaga kepresidenan memancar dari aksi Pinera.

Kedua, pemimpin transformasional harus memiliki basis asketisme politik yang memadai. Kata asketisme, bermula dari bahasa Yunani *ascesis* yang bermakna "pelatihan". Biasanya para atlet di Yunani, melakukan latihan keras sebelum pertandingan di Bukit Olimpus, yang salah satu tujuannya adalah mengosongkan dan mengasingkan diri dari nafsu-nafsu duniawi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asketisme diberi arti 'paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban'. Sementara dalam *Encyclopedia of*

the Middle Ages, Volume 2 (2000: 118) asketis merupakan sejumlah latihan penyesalan diri, hidup kekurangan, menahan malu atau aib, serta kontemplasi untuk menuju jiwa yang sempurna. Dengan demikian, asketisme politik secara umum bisa kita pahami sebagai upaya menjalankan aktivitas berpolitik berdasarkan pada prinsip kesederhanaan dan etika serta memproyeksikan tindakannya demi kemaslahatan rakyat banyak. Caranya, berpolitik tidak dengan mengedepankan kepentingan pribadi untuk mengejar kekuasaan dan kekayaan semata-mata melainkan demi tujuan kemaslahatan bangsa dan negara. Artinya, asketisme politik tak sekedar moralitas melainkan juga tindakan sosial. Dalam konstruks berpikir Habermas tindakan sosial ini biasanya melibatkan dua dimensi praksis yakni kerja dan interaksi.

Ketiga, memiliki sumberdaya politik (*political resources*) yang memadai untuk mendukung performa komunikatifnya. Pemimpin terpilih harus mengantongi kekuasaan yang sah (*legitimate power*) sebagai produk dari pemilu presiden langsung. Dalam menjaga performa, tentu saja terkait dengan dua aspek yang tak bisa dipisahkan, yakni citra dan agenda kerja. Citra terkait dengan carapandang masyarakat atas sosok SBY dengan segala macam atributnya, sementara agenda terkait dengan program kerja nyata SBY ke depan. Pacanowsky dan O'Donnell dalam bukunya *Communication and Organizational Culture* (1982), mendefinisikan performa sebagai metafora yang menggambarkan proses simbolik dari pemahaman akan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Performa ritual, hasrat, politis, sosial dan enkulturasi dari pemimpin sudah seharusnya mengacu pada jati diri pemimpin yang menginspirasi banyak pihak. Citra penting tetapi bukan segalanya, karena jika pemimpin secara dominan terjebak ke dalam politik citra saja, maka akan selalu menciptakan hiperealitas.

Kecenderungan politik citra mengarah pada apa yang disebut Jean Baudrillard dalam tulisannya *The Precession of Simulacra*, sebagai simulasi realitas. Pada dasarnya simulasi realitas ini merupakan sebuah tindakan yang memiliki tujuan membentuk persepsi yang cenderung palsu (*seolah-olah mewakili kenyataan*). Ruang pemakaian di mana tanda-tanda saling terkait

dianggap tidak harus memiliki tautan logis. Wajar jika hiperealitas dalam pandangan Baudrillard dimaknai sebagai "The simulation of something which never really existed." Sementara Umberto Eco menyebutnya sebagai "The authentic fake" atau kepalsuan yang otentik (dalam Heryanto, 2010:51). Tentu pemimpin transformasional tidak akan menjadikan politik citra sebagai segala-galanya karena basis tindakannya adalah selalu mengacu pada agenda kerja. Citra diposisikan secara proporsional sebagai salah satu bagian penunjang dalam merealisasikan agenda kerja.

E. Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa penyelenggaraan pemilu memiliki posisi yang strategis dalam proses demokrasi. Oleh karenanya, pemilu harus turut memperkuat proses konsolidasi dan pelembagaan demokrasi. Kedua, proses lahirnya pemimpin transformasional sangat tidak mudah. Tentu tidak menjadi jaminan bahwa pemilu yang demokratis akan otomatis melahirkan pemimpin transformasional. Hanya saja, pemilu demokratis yang berjalan secara reguler akan memperbesar kemungkinan lahirnya pemimpin transformasional tersebut terlebih jika para pemilih semakin rasional, partai politik giat menyelenggarakan literasi politik dan pemerintah terpilih nanti memiliki komitmen pada perbaikan nasib bangsa dan negara. Semoga, amien.

Daftar Pustaka :

- Ali, Novel. *Peradaban Komunikasi Politik Potret Manusia Indonesia*. (Bandung: Rosdakarya, 1999)
- Ashcraft, Richard. *Locke's Two Treatises of Government*. (Boston: Unwin Hyman, 1987)
- Boyd-Barret, Oliver and Newbold, Chris, *Approach to Media A Reader*. (New York: Arnold, 1995)
- Bavelas, Janet Beavin, Nicole Chovil and Jennifer Mullett. *Equivocal Communications* (Newbury Park, CA: Sage, 1990)
- Cohler, Anne M, Miller, Basia Carolyn and Stone, Harold Samuel (Eds.) *Montesquieu: Spirit of the Laws*. Cambridge Texts in the History of Political Thought. (Cambridge: Cambridge UP, 1989)
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Dahl, Robert A, *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonom Vs Control*. (Yale University Press, 1982)
- Encyclopedia of the Middle Ages, Volume 2*, 2000
- Gaffar, Afan. *Demokrasi Empiris dalam Era Orde Baru*, dalam Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (eds.), *Profil Budaya Politik Indonesia*. (Jakarta: PT.Temprint, 1991)
- Hart, Roderick and Don M. Burks, "Rhetorical Sensitivity and Social Interaction," *Speech Monographs* 39 (1972)
- Heryanto, Gun Gun. *Dinamika Komunikasi Politik*. (Jakarta: PT. Lasswell Visitama, 2011)
- Heryanto, Gun Gun. *Komunikasi Politik di Era Industri Citra*. (Jakarta: PT. Lasswell Visitama, 2010)
- Huntington, Samuel P. and Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in developing Countries*. (Cambridge: Harvard University Press, 1977)
- Hirokawa, R.Y. & M.S Poole (eds.), *Communication and Group Decision-making*. (Baverly Hills, CA: Sage, 1986)
- Ifanta, Dominic, Teresa A. Chandler and Jill E.Rudd, "Test of an Argumentative Skill Deficiency Model of Interposual Violence," *Communication Monographs* 26 (1989)
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication*. (Albuquerque, New Mexico : Wadsworth Publishing Company, 1998)
- McClosky, Herbert. *Political Participation, International Encyclopedia of the Social Sciences*, Edisi ke-2 (New York: The McMillan Company and the Free Press, 1972)
- Mosco, Vincent. *The Political Economy of Communication*. (London, New Delhi: SAGE Publication, 1996)
- MD, Mahfud Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik*. (Bandung: Rosdakarya, 1993)
- Neumann, Sigmund "Modern Political Parties" dalam *Comparative Politic: A Reader*, diedit oleh Harry E. Eckstein dan David E. Apter. (London: The Free Press of Glencoe, 1963)
- Powel Jr., Bingham. *Contemporary Democracies, Participan, Stability and Violence*. (New York: Harvard University Press, 1982)
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992)
- Sartori, Giovanni, *Theory of Democracy, Revisited*, (New York: Pantheon Books, 1987)
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- West, Richard and Turner, Lynn H. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2008)

II

